



## Analisis Kesiapsiagaan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir di Wilayah Kampung Melayu Kota Jakarta Timur

Sasqia Fadhilah Atelia<sup>1</sup>, Rahmat Hidayat<sup>2</sup>, Mochamad Faizal Rizki<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>2,3</sup>Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 22 Juli 2022

Revised: 25 Juli 2022

Accepted: 30 Juli 2022

### Abstract

*This study aims to study and find out about the preparedness analysis of the government and the community in dealing with flood disasters in the Kampung Melayu area of East Jakarta City through Preparedness Parameters according to LIPI/UNESCO-ISDR 2006 in which there are five indicators which include, knowledge and attitudes, policies and guidelines, emergency response plans, disaster warnings and resource mobilization. This study uses a qualitative method with the determination of informants using purposive sampling technique. Data collection techniques were carried out through interviews, observations and documentation studies and then analyzed through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The result of this research is that the community and government preparedness for flooding in Kampung Melayu in terms of knowledge and attitude dimensions is very minimal due to the lack of intellectual stimulus, then from the policy and guidance dimensions it is carried out through three stages, namely the pre-disaster stage, during the disaster and recovery, then the planning dimension. emergency response can work well in terms of making posts and providing tools needed by the community but not optimal in the evacuation and planning sector, the dimensions of disaster warning have gone well with the use of technology that can improve community preparedness and finally the dimension of resource mobilization is going well because people can ask for help preparedness in accordance with applicable procedures*

**Keywords:** *Melayu Village, preparedness, Flood*

(\*) Corresponding Author: [1710631180128@student.unsika.ac.id](mailto:1710631180128@student.unsika.ac.id)

**How to Cite:** Atelia, S., Hidayat, R., & Rizki, M. (2022). Analisis Kesiapsiagaan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir di Wilayah Kampung Melayu Kota Jakarta Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(14), 297-307. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6994835>.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis terletak di daerah rawan bencana alam. Berbagai kejadian bencana di alami oleh Indonesia salah satunya yaitu banjir. Bencana banjir di Indonesia pada umumnya di sebabkan karena faktor tingginya intensitas curah hujan karena Negara Indonesia memiliki iklim tropis. Bencana banjir yang selalu melanda setiap tahunnya di hampir semua wilayah di Indonesia tak terkecuali termasuk Ibukota Indonesia yaitu Jakarta ikut di landa banjir langganan.

Menurut data kejadian bencana di Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan wilayah Jakarta Timur mengalami kejadian banjir paling banyak berjumlah 43, di susul oleh wilayah Jakarta Selatan 24 kejadian, kemudian wilayah Jakarta Barat 18 kejadian. Wilayah Jakarta Timur selalu menjadi langganan banjir dari tahun ke tahun yang terdampak paling banyak di banding wilayah lain karena wilayah



Jakarta Timur memiliki cakupan luas terbesar di banding wilayah lain. Salah satunya yaitu wilayah Kampung Melayu.

Berbagai upaya dalam penanggulangan bencana banjir telah di lakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu pembangunan banjir kanal, normalisasi sungai, pemeliharaan sungai, antisipasi air pasang dengan pembuatan tanggul, penataan kali dan saluran, dan pembangunan pompa, pintu air, dan saringan sampah. Namun jika di lihat dengan kenyataannya sekarang, banjir tetap saja selalu melanda Jakarta. Persoalan banjir Jakarta memang seakan tidak pernah tuntas, menunjukkan seperti belum ada upaya efektif dari Pemerintah kepada masyarakat yang bisa membuktikan keberhasilan dalam mengatasi masalah banjir.

Hal tersebut sejalan dengan survei yang pernah di lakukan oleh Litbang Kompas dalam pengumpulan pendapat tentang persoalan banjir yang terus berulang di Jakarta melalui telepon pada 25-26 Januari 2020. Dari survei tersebut dapat di ketahui sebanyak 60,6% masyarakat Jakarta menyatakan tidak/kurang puas terhadap upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi persoalan banjir Jakarta selama ini, sebanyak 61,1% lainnya menyatakan tidak/belum efektif peringatan dini yang di laksanakan pemerintah kepada warga DKI Jakarta sebelum banjir awal Januari 2020.

Masyarakat berpandangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semestinya memahami topografi daerah dan sigap memberikan peringatan dini kepada warga di kawasan rawan banjir. Selain itu juga Pemerintah di nilai gagal mencegah banjir, dalam hal kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi korban banjir. Hal tersebut memang benar adanya sejalan dengan pernyataan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan pihaknya memfokuskan pada penanganan korban bencana dan bukan pencegahan banjir.

Pada kejadian banjir yang terjadi bulan November 2021, menunjukkan titik terdampak banjir terbesar berada di wilayah Kampung Melayu sebanyak 29 RT, ini merupakan jumlah paling banyak di banding wilayah lainnya di Jakarta Timur. Wilayah Kelurahan Kampung Melayu di pilih menjadi lokasi penelitian karena wilayahnya merupakan langganan banjir setiap tahun yang di sebabkan oleh luapan Sungai Ciliwung akibat kiriman air dari Bogor. Pada saat melakukan observasi awal peneliti menemukan penyebab lain wilayah Kampung Melayu sering terkena banjir yaitu terdapat permukiman padat penduduk yang berada di bantaran kali. Kondisi letak permukiman mereka juga tidak beraturan mulai dari bantaran kali hingga tanggul.

Selain itu juga peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa masih banyak sungai-sungai di titik lokasi banjir di wilayah Kampung Melayu yang belum di normalisasi. Fakta lain yang ditemukan oleh peneliti pada saat melakukan survei awal yaitu masih banyak warga yang belum menyiapkan Tas Siaga Bencana dan peralatan sederhana minimal seperti ban dan rompi pelampung di rumahnya, karena mereka beranggapan bencana banjir merupakan hal yang sudah biasa terjadi di wilayah mereka. Mereka mengetahui daerah mereka merupakan rawan banjir namun beberapa dari mereka menolak untuk di relokasi ke rumah susun/daerah yang lebih aman karena alasan faktor ekonomi dan lokasi rumah mereka yang strategis.

Kesiapsiagaan merupakan faktor penting yang menjadi fokus perhatian dewasa ini mengingat kesiapsiagaan adalah faktor penentu untuk pengurangan resiko bencana yang dapat di lakukan dan di upayakan sejak dini. LIPI/UNESCO (2006) Kesuksesan dalam penanganan dan evakuasi/pengungsian ketika banjir sangat bergantung dari kesiapsiagaan masyarakat dan perseorangan itu sendiri.

Masyarakat harus ikut serta membantu Pemerintah dalam peranannya untuk bersiap sedia menghadapi banjir dengan persiapan dini, serta pengetahuan yang cukup untuk menghadapi bencana banjir. Sikap dan perilaku dalam mengantisipasi setiap kejadian bencana yang terjadi secara tidak langsung di pengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat.

Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir akan membantu masyarakat dalam membentuk dan merencanakan tindakan apa saja yang perlu dilakukan ketika banjir. Pengertian kesiapsiagaan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Teori Kesiapsiagaan Bencana menurut LIPI/UNESCO-ISDR (2006) mencakup 5 indikator yaitu pengetahuan dan sikap, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumberdaya.

Sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di sebutkan bahwa Pengetahuan dan sikap yang termasuk dalam indikator Kesiapsiagaan di anggap penting sebagai pendukung dalam kesuksesan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai upaya dari antisipasi resiko bencana. Pemerintah sebagai pemegang kendali utama harus memiliki kesiapsiagaan dalam menangani dampak yang timbul akibat bencana. Selain itu masyarakat juga harus memiliki kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko jika bencana tiba-tiba terjadi. Penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat merupakan tanggung jawab besar yang di miliki oleh Pemerintah.

Dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1245 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lurah Sebagai Pengelola Penanggulangan Bencana Di Wilayah Kelurahan. Dijelaskan bahwa Lurah beserta perangkat-perangkatnya mengemban tugas untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah Kelurahan sesuai dengan yang terdapat di dalam aturan pedoman Keputusan Gubernur Jakarta Nomor 1245 Tahun 2020 tersebut.

Penanggulangan bencana yang dimaksud tersebut termasuk di dalamnya yaitu mulai dari sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana. Kejadian bencana banjir yang terus berulang di wilayah Kampung Melayu membutuhkan adanya perhatian dan penanganan yang serius baik dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah setempat yaitu Pemerintah Kelurahan. Kejadian bencana banjir di Wilayah Kampung Melayu yang terus berulang membutuhkan perhatian lebih dan penanganan yang serius dari Pemerintah Kelurahan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan warganya.

Dengan demikian maka kesiapsiagaan yang tinggi dalam menghadapi bencana harus di miliki oleh setiap elemen di dalam tubuh pemerintahan, tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk jajarannya serta bagi masyarakat yang dipimpinya. Mengingat dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang

bertanggung jawab dalam segala urusan penyelenggaraan negara termasuk penanggulangan bencana yaitu menjalankan fungsi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap masyarakat maka pemerintah wajib berperan aktif dalam mensosialisasikan program penanggulangan bencana banjir untuk mewujudkan kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap bencana banjir.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kesiapsiagaan**

Menurut Suttton dan Tierney (2006) kesiapsiagaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana guna menghindari adanya korban jiwa, kerugian harta benda, dan perubahan tata kehidupan masyarakat di kemudian hari. Pendapat lain disampaikan oleh BNPB (2012) kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana disebutkan kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

LIPI-UNESCO/ ISDR (2006) menyatakan kesiapsiagaan sebagai bentuk antisipasi bencana di bagi menjadi lima indikator, yaitu:

1. Pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana

Pengetahuan merupakan faktor utama dan menjadi kunci untuk kesiapsiagaan. Pengetahuan yang dimiliki mempengaruhi sikap dan kepedulian masyarakat untuk siap dan siaga dalam mengantisipasi dan kepedulian masyarakat untuk dan siaga dalam mengantisipasi bencana, terutama bagi mereka yang bertempat bencana alam.

Indikator pengetahuan dan sikap individu atau rumah tangga merupakan dasar yang semestinya dimiliki oleh individu meliputi pengetahuan tentang bencana, penyebab, dan gejalagejala, maupun yang harus dilakukan bila terjadi bencana.

2. Kebijakan dan panduan

Kebijakan kesiapsiagaan bencan alam sangat penting dan merupakan upaya konkrit untuk melaksanakan kegiatan siaga bencana. Kebijakan-kebijakan dituangkan dalam berbagai bentuk dan akan bermakna apabila di cantumkan secara konkrit dalam peraturan-peraturan.

3. Rencana Tanggap Darurat

Rencana untuk keadaan darurat menjadi bagian yang penting dalam kesiapsiagaan, terutam berkaitan dengan evakuasi, pertolongan dan penyelamatan, agar korban bencana dapat di minimalkan.

4. Peringatan Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

5. Mobilisasi Sumber Daya

Mencakup bagian sumber daya manusia (SDM), pendanaan, dan prasarana-sarana penting untuk keadaan darurat merupakan potensi yang

dapat mendukung kesiapsiagaan. Namun sebaliknya, mobilisasi sumber daya juga dapat menjadi kendala apabila mobilisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, mobilisasi sumber daya merupakan parameter kesiapsiagaan yang cukup penting.

### **Pemerintah Kelurahan**

Menurut Ndraha (1997), pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat. Sedangkan menurut Napitupulu (2012) Pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara.

Rasyid (dalam Muhadam Labolo, 2011:32) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintah itu sendiri.

Adapun Pemerintahan Kelurahan Menurut pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 mengemukakan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kerja kabupaten / kota dalam wilayah kerja kecamatan. Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 mengemukakan bahwa:

1. Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan
2. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui camat;
3. Lurah diangkat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil;
4. Syarat-syarat Lurah meliputi:
  - a. Pangkat/golongan minimal penata (III/C)
  - b. Masa kerja minimal 10 tahun
  - c. Kemampuan teknis dibidang adminisitrasi pemerintahan dan memahami keadaan sosial budaya masyarakat setempat

Kelurahan sebagai kesatuan wilayah terkecil di dalam wilayah kecamatan di daerah kabupaten/kota, dapat berfungsi sebagai unit kerja pelayanan pada masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat kepada Lurah. Sehingga dalam tugas pokok dan fungsinya, pemerintah kelurahan menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kelurahan sesuai batas-batas kewenangan yang di limpahkan camat.

### **Masyarakat**

Menurut Ralph Linton (Soerjono Soekanto, 2006: 22), masyarakat adalah setiap kumpulan individu-individu yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat memilah-milah sendiri. Definisi lain, (Koentjaraningrat, 2009: 115-118) masyarakat adalah solidaritas eksistensi

manusia yang menghubungkan yang ditunjukkan oleh suatu tatanan adat tertentu yang konsisten, dan dibatasi oleh perasaan kepribadian bersama. Kesesuaian merupakan kesatuan wilayah lokal yang memiliki empat kualitas, yaitu: 1) Interaksi antar penghuninya, 2). Adat istiadat, 3) Kesenambungan waktu, 4) Rasa kepribadian yang kokoh yang mengikat seluruh warga

### **Banjir**

Hadisusanto (2011) menyatakan banjir adalah tinggi muka air melebihi normal pada sungai dan biasanya mengalir meluap melebihi tebing sungai dan luapan airnya menggenangi pada suatu daerah genangan. Sedangkan menurut Rahayu (2009) banjir adalah kondisi dimana tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air akibat kelebihan kapasitas di suatu daerah dan menimbulkan kerugian, baik dari segi kebendaan seperti infrastruktur, ekonomi maupun segi kemanusiaan dengan hilangnya nyawa atau korban jiwa.

### **METODE**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang humanistik, serta dapat menjelaskan perspektif naturalistik dan perspektif interpretif pengalaman manusia. Metode penelitian menurut Sugiyono (2017:2), pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penentuan informan menggunakan teknik purposive, peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan, kriteria ini harus sesuai dengan topic penelitian. Mereka yang dipilih pun harus di anggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih beberapa informan yang terlibat langsung untuk mengetahui mengenai kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi banjir di wilayah Kampung Melayu Kota Jakarta Timur

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi, triangulasi (gabungan). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam, dokumentasi dan juga studi pustaka. Analisis data menggunakan konsep Miles dan Huberman (1984) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu : data reduction, data display, conclusion drawing/verification

### **RESULTS & DISCUSSION**

#### **Pengetahuan dan Sikap**

Guna dapat mengkaji tentang dimensi ini, maka kita harus memmbaginya kedalam dua indikator utama yakni pengetahuan dan sikap. Pengetahuan meliputi Pemahaman tentang bencana banjir, dampak yang ditimbulkan sampai pada tahapan latarbelakang terjadinya Banjir. Adapun sikap meliputi Tindakan yang dilakukan ketika terjadi Banjir, tindakan untuk mengurangi resiko kerugian dan sikap dan kepedulian terhadap resiko bencana banjir.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama beberapa bulan baik melalui kajian data primer yang meliputi observasi dan wawancara serta data sekunder yang ditempuh melalui studi dokumentasi, maka pengetahuan masyarakat Kampung Melayu, Jakarta Timur terhadap fenomena bencana alam banjir sangatlah minim, hal ini dikarenakan sosialisasi pengetahuan dari pihak pemerintah kelurahan sampai dengan Suku Dinas Jakarta Timur yang terkait tidak menjalankannya secara optimal, selain itu sosialisasi banjir hanya dilakukan enam bulan sekali ketika musim hujan tiba, sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui secara pasti akar yang melatarbelakangi terjadinya banjir.

Adapun secara dimensi sikap masyarakat atas penanggulangan banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur tidak dapat dikatakan dengan baik. Hal ini berkaitan erat dengan langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah ketika melakukan transfer pengetahuan mengenai bencana banjir. Sehingga langkah yang terkesan mendadak ini secara spontan tidak dapat menghindarkan beberapa kerugian baik dari segi material maupun spiritual atas fenomena banjir yang terjadi di Kampung Melayu, Jakarta Timur.

#### **Kebijakan dan Panduan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama beberapa bulan baik melalui kajian data primer yang meliputi observasi dan wawancara serta data sekunder yang ditempuh melalui studi dokumentasi, maka kebijakan dan panduan atas penanggulangan bencana terbagi menjadi tiga bagian yakni tahap pra-bencana yang dilakukan melalui pemberian stimulus mitigasi bencana dari pihak pemerintah terait terhadap masyarakat sebagaimana yang telah terurai pada dimensi pengetahuan dan sikap.

Kemudian kebijakan kedua, yakni tahap saat bencana dimana dalam hal ini pemerintah melakukan pembunyian sirine sampai memberlakukan kegiatan tanggap darurat. Adapun tahapan ketiga adalah pemerintah melakukan kegiatan pasca bencana, dimana penulis masih menyoroti adanya tindakan yang kurang baik dimana pencegahan preventif pada tahun yang akan mendatang masih terbilang minim, hal ini dibuktikan melalui adanya korban jiwa maupun material ketika banjir terjadi sehingga pencegahan akan banjir tidak akan terjadi dengan maksimal atau dengan kata lain banjir akan terus berulang.

#### **Rencana Tanggap Darurat**

Dimensi rencana tanggap darurat dalam kesiapsiagaan menangani banjir dapat dianalisis melalui beberapa indikator yang meliputi Sosialisasi dan latihan/simulasi kebencanaan, Rencana Evakuasi, Posko Bencana, Pertolongan Pertama, Penyelamatan, Keselamatan dan Keamanan, Pemenuhan kebutuhan dasar dan peralatan dan perlengkapan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama beberapa bulan baik melalui kajian data primer yang meliputi observasi dan wawancara serta data sekunder yang ditempuh melalui studi dokumentasi, maka Dimensi rencana tanggap darurat dalam kesiapsiagaan menangani banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur berjalan secara maksimal ketika melakukan kegiatan pembangunan posko-posko bencana, pertolongan dasar dan pemenuhan peralatan yang dibutuhkan masyarakat, namun rencana evakuasi masih terkendala oleh karena banyaknya masyarakat yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam satu tempat pengungsian.

### **Peringatan Bencana**

Dimensi peringatan bencana dalam kesiapsiagaan bencana banjir di Kampung Melayu, Jakarta timur dapat diketahui melalui tersedianya dua hal yang meliputi indikator teknologi peringatan bencana dan indikator prosedur tetap pelaksanaan dan tersedianya penyebar-luasan peringatan bencana dan prosedur tetap pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama beberapa bulan baik melalui kajian data primer yang meliputi observasi dan wawancara serta data sekunder yang ditempuh melalui studi dokumentasi, maka Dimensi peringatan bencana dalam kesiapsiagaan menangani banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan melalui adanya beberapa teknologi dari BMKG yang dapat memudahkan pendeteksian bencana dan beberapa sirine dan penggunaan sosial media untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas terjadinya banjir

### **Mobilisasi Sumber Daya**

Dimensi mobilisasi sumber daya dalam kesiapsiagaan bencana banjir di Kampung Melayu, Jakarta timur dapat dianalisis melalui Sumber Daya Manusia (SDM), pendanaan dan prasarana-sarana penting untuk keadaan darurat merupakan potensi yang dapat mendukung kesiapsiagaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama beberapa bulan baik melalui kajian data primer yang meliputi observasi dan wawancara serta data sekunder yang ditempuh melalui studi dokumentasi, maka Dimensi mobilisasi sumber daya dalam kesiapsiagaan menangani banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur belum berjalan sebagai mana mustinya dari segi SDM baik masyarakat maupun pemerintah karena masih minimnya stimulus keilmuan atas kesiapsiagaan bencana banjir yang diberikan oleh pihak pemerintah terkait

Kemudian pendanaan dalam melakukan kesiapsiagaan bencana banjir, maka pemerintah mendapatkan alokasi dari pihak daerah I maupun nasional yang kemudian direlokasikan untuk melakukan mitigasi bencana banjir di Jakarta Timur. Adapun indikator terakhir terkait dengan prasaran yang mendukung kesiapsiagaan juga dapat terpenuhi ketika masyarakat mengajukan proposal kebutuhan kepada pihak kelurahan yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan mitigasi bencana banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di wilayah Kampung Melayu Kota Jakarta Timur melalui Parameter Kesiapsiagaan Menurut LIPI/UNESCO-ISDR 2006 yang didalamnya terdapat lima indikator yang meliputi, pengetahuan dan sikap, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, peringatan bencana serta mobilisasi sumber daya

1. Dimensi pengetahuan dan sikap dalam kesiapsiagaan bencana banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur belum berjalan optimal karena minimnya stimulus keilmuan yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat, sehingga berakibat pada sikap yang cenderung apatis atas fenomena banjir

2. Dimensi kebijakan dan panduan dalam kesiapsiagaan bencana banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur berjalan sesuai dengan panduan yang berlaku, yakni melalui tiga tahapan mitigasi bencana yang meliputi pra-bencana, tahap saat bencana dan tahap pemulihan
3. Dimensi rencana tanggap darurat dalam kesiapsiagaan bencana banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik pada pembangunan posko-posko bantuan, pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat ketika terjadi banjir serta pertolongan dasar. Namun belum optimal dalam perencanaan dan evakuasi korban.
4. Dimensi peringatan bencana dalam kesiapsiagaan bencana banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur dilakukan secara maksimal dengan penggunaan teknologi baik dari sisi media sosial sampai sirine-sirine yang dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk menangani banjir
5. Dimensi mobilisasi sumber daya dalam kesiapsiagaan bencana banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur dilakukan sesuai dengan prosedur, dimana masyarakat dapat mengajukan kebutuhan dalam kesiapsiagaan banjir melalui proposal pengajuan bantuan pra-bencana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adiyoso, Wignyo. 2018. *Manajemen Bencana: Pengantar dan Isu-Isu Strategis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan, R. C. (2021). *Etika Politik & Pemerintahan*. Lampung: Pusaka Media.
- Miles, M.B., dan Huberman A.M. 1984. *Analisis data kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ndraha, Talizuduhu. 2015. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1245 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lurah Sebagai Pengelola Penanggulangan Bencana Di Wilayah Kelurahan

### **Jurnal**

- Akhirianto, N. A. (2018). PENGETAHUAN DAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT TERHADAP BENCANA BANJIR DI KOTA BEKASI (STUDI KASUS: PERUMAHAN PONDOK GEDE PERMAI). *Social Work in Health Care*, 57(7), 548–562. <https://doi.org/10.1080/00981389.2018.1471016>
- Alfonita, F. (2018). HUBUNGAN SIKAP TERHADAP RESIKO BENCANA KEBAKARAN DENGAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI KEBAKARAN DI PEMUKIMAN KELURAHAN AIR PUTIH KECAMATAN SAMARINDA ULU. *Computers and Industrial Engineering*, 2(January), 6. <http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp->

- content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf%0Ahttp://wwwlib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.022%0Ahttps://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper%0Ahttps://tore.tuhh.de/hand
- Arif, M., Studi, P., & Geografi, P. (2019). Analisis wilayah berpotensi banjir daerah sumatera barat untuk pelaksanaan pembelajaran geografi berorientasi bencana alam 1. 4(1), 53–60.
- Chen, H., Xu, H., Yenti Sumarni, Siaha Widodo, A., Pujayanti, D. A., Ishatono, I., Raharjo, S. T., Aristi, N. M., & Pratama, A. R. (2020). MEMAHAMI MASYARAKAT DAN PERSPEKTIFNYA. *Al Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 159. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Devi Erlia, Rosalina Kumalawati, N. F. A. (2017). ANALISIS KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH MENGHADAPI BENCANA BANJIR DI KECAMATAN MARTAPURA BARAT KABUPATEN BANJAR. 4(3), 15–24.
- Eldi. (2020). ANALISIS PENYEBAB BANJIR DI DKI JAKARTA. 1(6). <https://doi.org/10.47492/jip.v1i6.203>
- Elfandari, A. R. (2018). KERJASAMA INDONESIA - BELANDA DI BIDANG TATA KELOLA AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012-2017 (STUDI KASUS PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA JAKARTA). 1–24.
- Erlina. (2018). ANALISIS BANJIR DAN SEDIMENTASI WILAYAH SUNGAI BRANTAS ( TINJAUAN TERHADAP METODE PENGENDALIAN ). XIII(1), 1–14. <https://doi.org/10.47200/jts.v13i1.835>
- FIKRI, A. F., Maarif, S., Widana, I. K., & Tyas, T. H. (2020). Kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Menghadapi Bencana Banjir Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(2), 335–342. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1441>
- Hadi, H., Agustina, S., & Subhani, A. (2019). Penguatan Kesiapsiagaan Stakeholder dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Gempabumi. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 3(1), 30. <https://doi.org/10.29408/geodika.v3i1.1476>
- Heryana, A. (2020). Pengertian Dan Jenis Bencana. *Researchgate.Net*, January, 1–4. [https://www.researchgate.net/publication/338537206\\_Pengertian\\_dan\\_Jenis\\_Bencana](https://www.researchgate.net/publication/338537206_Pengertian_dan_Jenis_Bencana)
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 2(2), 139–146. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1088>
- Itratip, W. J. &. (2017). ANALISA PENYEBAB BANJIR DAN NORMALISASI SUNGAI UNUS KOTA MATARAM. 3(1), 242–249.
- Jha, S., Martinez, A., Quising, P., Ardaniel, Z., & Wang, L. (2018). NATURAL DISASTERS , PUBLIC SPENDING , A CASE STUDY OF THE PHILIPPINES Asian Development Bank Institute. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3204166>, 817.
- LIPI-UNESCO/ISDR. (2006). Kajian kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana gempa bumi dan tsunami (Assessment of Community Preparedness in Anticipating Earthquake and Tsunami

- Disasters). Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Bencana Gempa, 1–579. <http://www.buku-e.lipi.go.id/utama.cgi?lihatarsip&jans001&1273262299&51>
- Mahardika, B., Kurniansyah, D., Adiarsa, S. R., Ilmu, M., Unniversitas, P., Karawang, S., Ilmu, D., Universitas, P., & Karawang, S. (2022). Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanganan Banjir di Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. 8(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6044922>
- Mariana, D. I., Muafiqie, H., Ekonomi, M. I., & Ulum, U. D. (2018). Pengaruh Kinerja BPBD Dalam Penanggulangan Banjir Dampaknya Terhadap Pengurangan Kerugian Material Di Kabupaten Jombang. 32–44.
- Muis, I. (2018). Model Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua.
- Rosyana Putri Tictona, S. B. M. (2020). Manajemen bencana tanah longsor di desa sambungrejo kecamatan grabag kabupaten magelang. 4(2).
- Setyowati, D. L. (2019). Pendidikan Kebencanaan. Urgensi Pendidikan Mitigasi Bencana, 1–14.
- Taryana, A., Rifa, M., Mahmudi, E., & Beki, H. (2022). ANALISIS KESIAPSIAGAAN BENCANA BANJIR DI JAKARTA. 13(2), 302–311.
- Teja, M. (2018). kesiapsiagaan masyarakat terhadap kelompok rentan dalam menghadapi bencana alam di lombok.
- Widjanarko, M., & Minnafiah, U. (2018). Pengaruh Pendidikan Bencana Pada Perilaku Kesiapsiagaan Siswa. *Jurnal Ecopsy*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.20527/ecopsy.v5i1.4878>
- Yatnikasari, S., Pranoto, S. H., & Agustina, F. (2020). Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Terhadap Kesiapsiagaan Kepala Keluarga dalam Menghadapi Bencana Banjir. *Jurnal Teknik*, 18(2), 135–149. <https://doi.org/10.37031/jt.v18i2.102>